

**GUGAT CERAI AKIBAT SUAMI TIDAK ADIL DALAM BERPOLIGAMI
DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

YUN 'AISYATA PUSPITASARI

C 100060180

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Salah satu buktinya bahwa manusia diberikan cipta, rasa, karya dan karsa. Oleh karena itu, tidaklah heran ketika manusia mampu mengembangkan pola pikirnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih maju lagi. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan bersifat individu melainkan manusia sebagai makhluk yang sosial yakni makhluk yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain serta saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Aristoteles seorang filosofis Yunani pernah berkata bahwa manusia adalah *zoon politicon* yaitu selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia yang lain untuk hidup bersama kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat tertentu sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang lain di sekitarnya. Dengan bentuknya yang kecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya suatu keluarga.¹

Suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan bagian terkecil dalam masyarakat yang di dalam hidupnya pasti mempunyai sengketa baik di lingkungan keluarga maupun sengketa di lingkungan masyarakat.

¹ Lilik Rasyidi, *Hukum dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung:Alumni, 1982, Hal 1

Karena di Indonesia terdapat beberapa Badan Peradilan, maka sengketa itu dapatlah untuk diselesaikan. Salah satunya adalah Pengadilan Agama, yang fungsi dari pengadilan tersebut adalah sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 yang berbunyi “*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini*”. Selain itu dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bertugas di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syari’ah.²

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuka peluang bagi calon pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan. Pasal ini menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan sosio-kultur masyarakat Indonesia yang sedang merangkak menuju tatanan masyarakat maju dengan ciri utama kuatnya kesadaran akan hak dan kewajiban.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Agama*, Bandung: Mandar Maju, Hal 204

Dengan berpegang pada asas kebebasan membuat perjanjian, di sisi lain dengan dilaksanakannya perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah telah melahirkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri seperti yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.³

Pada umumnya apabila telah dilaksanakan suatu perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan, pasti timbul suatu angan-angan di dalam pikiran mereka untuk hidup berkeluarga dalam keadaan selalu rukun, bahagia, sejahtera selama-lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia.⁴

Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa perkawinan yang baik yaitu perkawinan yang mencakup sifat sakinah (tenteram), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (sayang). Hal tersebut dipertegas di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*". Ketentuan dalam pasal ini membuka kemungkinan untuk diterapkan model keluarga inti dalam kehidupan umat Islam Indonesia, namun penerapan itu tidak bersifat mutlak, artinya selama penerapan itu dapat mewujudkan tujuan perkawinan.⁵

Tetapi dalam kenyataannya sekarang ini, tidak selamanya pasangan suami isteri itu dalam kehidupan keluarganya selalu merasakan kebahagiaan dan ketenteraman. Adakalanya pasangan suami isteri tersebut tidak melaksanakan

³ Mimbar Hukum Nomor 40 Tahun 1998, Hal 55-56

⁴ Sutiono Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta:Liberty, 1989, Hal 29

⁵ Mimbar Hukum Nomor 30 Tahun 1997, Hal 34

kewajibannya atau terjadi perselisihan yang membahayakan ikatan perkawinan mereka.⁶

Keadaan seperti di atas terkadang masih dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian, sehingga diantara kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dapat hidup rukun kembali seperti semula sebelum ada suatu permasalahan. Tetapi ada pula dalam perselisihan dan percekocokkan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai. Sehingga apabila keadaan yang demikian itu dilanjutkan, maka untuk mewujudkan keluarga yang kekal, bahagia, damai dan sejahtera tidak akan terwujud sesuai dengan syari'at Islam.

Pada hakekatnya mentalaq seorang isteri adalah hak dari suami tetapi isteri juga dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami. Salah satu alasan yang dapat digunakan adalah apabila suami dalam melakukan poligami tidak berlaku adil kepada isteri-isterinya. Dalam firman Allah Qur'an surat An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja, atau ambillah budak-budak yang di bawah tangan kamu, sebab yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat zalim”.

⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982, Hal 27

Bertitik tolak dari ayat diatas, Rasulullah s.a.w melarang seorang pria menghimpun lebih dari empat orang isteri pada saat yang sama. Ketika ayat itu turun, Rasulullah memerintahkan kepada setiap pria yang memiliki lebih dari empat orang isteri agar segera menceraikan isteri-isterinya sehingga maksimal setiap pria hanya memperisterikan empat orang wanita. Ketentuan ini ditegaskan dalam ucapannya : *“Pilihlah dari mereka empat orang (isteri) dan ceraikan selebihnya”*. (H.R. Malik, An - Nasa’i dan Addaruquthni)

Poligami juga dikenal di kalangan bangsa Medes, Babilonia, Abbesinia, dan Persia. Bahkan poligami yang dipraktekkan bangsa Yunani terkesan sangat tidak manusiawi. Bangsa Yunani bukan saja memiliki seorang isteri yang dapat dipertukarkan dengan orang lain, tetapi juga dapat diperjualbelikan diantara mereka pada umumnya. Di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, mengawini sejumlah wanita merupakan hal wajar dan mereka menganggap wanita-wanita itu sebagai hak milik yang biasa dibawa-bawa dan diperjualbelikan.⁷

Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 tidak menetapkan suatu peraturan tentang poligami. Hal ini dapat kita lihat dari makna (kandungan) ayat tersebut yang tidak menyiratkan anasir perintah atau anjuran tetapi unsur kebolehan. Kebolehan itu bukan merupakan kebolehan mutlak, tetapi kebolehan bersyarat yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Suatu indikasi bahwa kebolehan berpoligami sangat sulit dipraktekkan karena tidak semua pria

⁷ Mimbar Hukum Nomor 51 Tahun 2001, Hal 68.

dapat memenuhi persyaratan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ

وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya :

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai). Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ketentuan ayat diatas, Al-Qur'an menggambarkan bahwa poligami mengandung resiko besar terhadap keadilan sosial dan kebahagiaan hidup rumah tangga yang merupakan soko guru kebudayaan dan peradaban. Dalam kenyataan sosial, praktek poligami tidak didasari pada pertimbangan-pertimbangan logis tetapi justru lebih didorong oleh nafsu rendah kaum pria tanpa mengindahkan faktor keadilan sebagaimana disyariatkan Al-Qur'an.⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa polemik seputar poligami bermuara pada dua pandangan. Pandangan pertama cenderung memahami teks Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129, secara eksplisit mengandung pelarangan poligami. Sementara pandangan kedua menyebutkan bahwa ruh Al-Qur'an yang sesungguhnya adalah monogami karena pernikahan dengan

⁸ *Ibid*, Hal 69

lebih dari satu isteri tergantung pada persamaan dan keadilan mutlak antara isteri-isteri.

Persyaratan itu (keadilan dan persamaan) hampir tidak mungkin diwujudkan dalam kehidupan sosial muslim sebagaimana diisyaratkan Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 129. Oleh karena itu seorang pria muslim hendaknya membatasi diri dengan monogami. Sebab menikahi lebih dari seorang isteri, tanpa dibarengi kemampuan berlaku adil, sama artinya dengan menjerumuskan diri ke dalam posisi yang mustahil.⁹

Pengertian adil menurut Hasbi Ash. Shiddieqy bahwa manusia di dalam hukum Islam, sama keadaannya. Mereka tidak lebih melebihi karena kebangsaan, karena keturunan, karena harta, atau karena kemegahan. Tak ada di dalam hukum Islam penguasa yang bebas dari jeratan undang-undang, apabila mereka berbuat dhalim. Semua manusia di hadapan Allah adalah sama.

Nash-nash Al-Qur'an tidak membatasi keadilan kepada sesuatu golongan manusia. Keadilan di dalam Islam diterapkan kepada semua manusia. Keadilan yang merata itulah yang menyebabkan umat manusia memeluk Islam afwajan.¹⁰

Menurut pendapat Aristoteles yang mengemukakan bahwa keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, selanjutnya beliau membedakan 2 macam keadilan, yaitu :

⁹ *Ibid*, Hal 70-71

¹⁰ T.M. Hasbi Ash.Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, Hal 82-83

1. Keadilan Distributif : memberikan kepada setiap orang bagian berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.
2. Keadilan Kumulatif : memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pada azas kebersamaan.¹¹

Pada dasarnya hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih memperbaiki diri tetap berada dalam ikatan perkawinan itu.

Maka dapat kita ketahui bahwa perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian tersebut.¹²

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dalam hal ini penulis memilih judul “GUGAT

¹¹ Mudjono, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : FKIS-IKIP Yogyakarta, 1974, Hal 9

¹² Djamil Latif, *Op. Cit.*, Hal 28-30

CERAI AKIBAT SUAMI TIDAK ADIL DALAM BERPOLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN”.

B. Pembatasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembatasan masalah yang diharapkan, terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, dan tidak terjadi pengertian yang kabur, serta meluasnya penafsiran maka perlu adanya pembatasan masalah.

Terlebih dahulu akan penulis sampaikan kata perkata tentang judul tersebut

- Gugat cerai, maksudnya adalah seorang isteri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada kantor Pengadilan Agama.
- Akibat suami tidak adil dalam berpoligami, maksudnya adalah bahwa suami dalam melakukan poligami ternyata tidak bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya. Dalam kasus ini, suami memberikan jatah/bagian kepada setiap isteri berdasarkan jasanya saja. Karena sesama manusia, seharusnya suami memberikan kepada setiap isteri bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap isteri apa yang menjadi haknya berdasarkan pada asas kebersamaan.
- Di Pengadilan Agama Sragen, maksudnya adalah kasus tersebut ada di Pengadilan Agama Sragen.
- Jadi, maksud judul *“GUGAT CERAI AKIBAT SUAMI TIDAK ADIL DALAM BERPOLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN”* adalah

bahwa seorang suami yang telah melakukan poligami ternyata tidak bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya. Karena sesama sebagai manusia, seharusnya suami tersebut memberikan kepada setiap isteri bagian yang sama. Tetapi dalam kenyataannya, suami memberikan bagian berdasarkan jasanya. Maka dari itu suami dianggap tidak bisa berlaku adil antara isteri yang satu dengan isteri yang lain yang mengakibatkan salah satu isteri mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sragen.

Oleh karena itu penulis hanya akan meneliti tentang proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan suami tidak adil dalam berpoligami di Pengadilan Agama Sragen dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian karena alasan poligami di Pengadilan Agama Sragen.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong seorang suami melakukan poligami di Pengadilan Agama Sragen?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang melatar belakangi terjadinya perceraian karena alasan suami tidak adil dalam berpoligami di Pengadilan Agama Sragen?
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan suami tidak adil dalam berpoligami di Pengadilan Agama Sragen?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong seorang suami melakukan poligami di Pengadilan Agama Sragen.
2. Untuk mengetahui secara jelas mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian karena alasan suami tidak adil dalam berpoligami di Pengadilan Agama Sragen.
3. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan suami tidak adil dalam berpoligami di Pengadilan Agama Sragen.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan suami tidak adil dalam berpoligami serta dapat menambah teori kepustakaan bagi penulis dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang sedang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis. Selain itu dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan ilmu bagi pembaca dan penulis yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan perceraian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

Maka untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang deskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu dengan mempertegas hipotesa-hipotesa lama atau baru dalam rangka menyusun teori baru.¹³

Alasan menggunakan penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses perceraian karena suami tidak adil dalam berpoligami.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang telah penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sragen.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Sragen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh tidak dengan secara langsung dari yang memberikan data atau informasi, tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, arsip-arsip, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 1

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indo Press, 1986, Hal 10

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data primer, maka penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan terhadap teori-teori hukum dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literature, arsip dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan hal yang penting untuk memperoleh data primer. Dalam wawancara ini dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data-data yang lebih mendalam kepada pihak yang berkompeten dengan

penulisan skripsi ini yaitu dengan para pihak di Pengadilan Agama Sragen. Dengan demikian, penulis dapat lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut.

6. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Setelah jenis data dikumpulkan, maka analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun model analisis data yang dipilih adalah interactive model of analysis (model analisis interaktif).¹⁴

Di dalam interactive model of analisis terdapat tiga komponen pokok, berupa :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Data Reduction adalah sajian dari analisis, sesuatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Sajian Data (*Data Display*).

¹⁴ Sutopo H.B., *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*, Pusat Penelitian UNS : Surakarta, 1998, Hal 37

Data Display adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset, dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data, penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

Conclusion Drawing merupakan kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam data reduction dan data display. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil lebih kokoh.¹⁵

Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut :

Langkah pertama adalah mengumpulkan data. Setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, membuang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data, yaitu rakitan informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap karena terdapat kekurangan data, maka peneliti dapat melakukan pengumpulan data lagi.

Setelah data-data terkumpul secara lengkap, kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

¹⁵ *Ibid*, Hal 35

G. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematika di dalam tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penulisan Skripsi
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Syarat-syarat Sah dan Rukun Perkawinan
 - 3. Tujuan Perkawinan
 - 4. Tatacara Perkawinan
- B. Tinjauan Umum Tentang Adil dan Poligami
 - 1. Pengertian Adil Secara Umum
 - 2. Pengertian Adil Menurut Islam
 - 3. Pengertian Poligami

4. Sejarah Singkat Poligami
5. Syarat Melakukan Poligami
6. Hukum Melakukan Poligami
7. Pembatasan Poligami
8. Hikmah Poligami

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian
2. Alasan-alasan Perceraian
3. Tatacara Perceraian
4. Akibat-akibat Perceraian

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DATA PENELITIAN

1. Faktor-faktor yang mendorong seorang suami melakukan poligami di Pengadilan Agama Sragen.
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian karena alasan suami tidak adil dalam berpoligami di Pengadilan Agama Sragen.
3. Proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan suami tidak adil dalam berpoligami di Pengadilan Agama Sragen.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang mendorong seorang suami melakukan poligami di Pengadilan Agama Sragen.

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian karena alasan suami tidak adil dalam berpoligami di Pengadilan Agama Sragen.
3. Proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan suami tidak adil dalam berpoligami di Pengadilan Agama Sragen.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN